

**PERANAN PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT
USAHA RAKYAT DALAM USAHA MENGURANGI KREDIT
BERMASALAH**

(Studi Kasus Pada Bank BJB Cabang TS)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Manajemen

Oleh :

Marisha Mutiara Dewi

2016120183

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM SARJANA MANAJEMEN

No. 2011/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

BANDUNG

2020

**THE ROLE OF PEOPLE BUSINESS CREDIT PROVISION AND
SUPERVISION IN ORDER TO REDUCING BAD DEBT**

(Case Study at Bank BJB TS Branch)



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements
For Bachelor's Degree in Management

By

Marisha Mutiara Dewi

2016120183

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

PROGRAM IN MANAGEMENT

No. 2011/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

BANDUNG

2020

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA MANAJEMEN**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERANAN PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT
USAHA RAKYAT DALAM USAHA MENGURANGI KREDIT
BERMASALAH**

(Studi Kasus Pada Bank BJB Cabang TS)

Oleh:

Marisha Mutiara Dewi

2016120183

Bandung, 1 Agustus 2020

Ketua Program Sarjana Manajemen,

Dr. Istiharini, CMA.

Pembimbing Skripsi,

20200802058

Inge Barlian, Dra, Ak., M.Sc

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Marisha Mutiara Dewi
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 Januari 1998
NPM : 2016120183
Program studi : Manajemen
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERANAN PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT USAHA
RAKYAT DALAM USAHA MENGURANGI KREDIT BERMASALAH
(Studi Kasus Pada Bank BJB Cabang TS)

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan : Inge Barlian, Dra, Ak., MSc.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan Tanggal :

Pembuat Pernyataan :



(Marisha Mutiara Dewi)

ABSTRAK

Menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha bank terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa perbankan lainnya. Bank menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan salah satu jenis kredit yang dikeluarkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program pemerintah berupa pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki angunan tambahan atau angunan tambahan belum cukup. Untuk menyalurkan KUR pemerintah bekerja sama dengan bank yang ada di Indonesia dan salah satunya adalah Bank BJB Cabang TS Bandung. Disamping untuk mendukung program pemerintah, Bank BJB juga ingin meningkatkan kinerja dan mendapatkan keuntungan dari pemberian KUR tersebut berupa bunga yang dibebankan dan biaya administrasi kredit. Namun sering kali terdapat nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sehingga menimbulkan NPL pada bank. Maka dari itu, untuk mencegah timbulnya nilai NPL, pihak bank perlu menjalankan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Penelitian membahas mengenai pelaksanaan prosedur, pengawasan kredit, dan faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan prosedur pemberian dan pengawasan kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank BJB. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan pihak Bank BJB dan data sekunder berupa dokumen perusahaan, litelatur, internet, dan data keuangan.

Berdasarkan kasus yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur pada Bank BJB cabang TS sudah dilakukan dengan baik dan harus terus dipertahankan. Hanya saja penulis menemukan kekurangan dimana pihak bank kurang teliti dalam melakukan *cross check* keaslian dokumen usaha debitur dan melakukan analisis karakter debitur. Selain melaksanakan prosedur pemberian, pihak bank juga melakukan pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum pinjaman kredit diberikan, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah pinjaman kredit diberikan. Pengawasan represif bisa berupa *monitoring on-site* dengan mendatangi tempat usaha debitur dan *monitoring off-site* dengan mengecek status pembayaran debitur. Dalam menghadapi wabah covid-19, pihak bank memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabah. Dalam memberikan restrukturisasi kredit tersebut pihak bank melakukan pengawasan preventif dengan melakukan wawancara dan observasi keadaan usaha debitur, sedangkan pengawasan represif yang dilakukan adalah dengan melakukan konfirmasi mengenai perkembangan usaha debitur agar pemberian restrukturisasi kredit bisa terus disesuaikan dengan keadaan usaha debitur. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan selama pemberian kredit berlangsung.

Kata kunci: prosedur pemberian kredit, pengawasan kredit, Kredit Usaha Rakyat, *non-performing loan (NPL)*.

ABSTRACT

According to RI Law No.10 of 1998 concerning banking, bank's business activities consist of three main activities those are raising funds, collecting funds, and providing other banking services. Bank collecting funds in the form of credit and one type of credit that issued is KUR. KUR is a government program in the form of financing a working capital and/ or investment to individual, business entities, or business groups that are productive and feasible but do not have an additional collateral or additional collateral insufficient. To distribute KUR, the government cooperates with banks in Indonesia and one of them is Bank BJB TS branch Bandung. Beside to support government program, Bank BJB also aims to improve bank performance and gain some benefit from interest charge and credit administration fee. But often times some debtor are unable to refund the credit that emerge the NPL values at the bank. Therefore, to prevent the emerge of NPL, the bank needs to run the credit provision and supervision that have been set by the bank. This thesis mainly discuss about credit provision, credit supervision, and some factors that have to be considered to prevent the bad debt.

This type of research is descriptive research with case study approach. This type of research is expected to describe the credit provision and supervision of KUR at Bank BJB TS branch Bandung. This research used primary dan secondary data. Primary data were obtained from an interview with Bank BJB and secondary data obtained from company's documents, literatures, internet, and financial data.

Based on the case study, it can be concluded that the implementation of procedur provision at Bank BJB TS branch has been done well and they have to continue to maintain it. But that are some deficiencies where the bank is less careful in cross-checking the authenticity of debtor business documents and analyzing the character of the debtor. Beside that, the bank also did a preventive supervision and repressive supervision. Preventive supervisions are executed before the credit are given and repressive supervision executed after the credit are given. Repressive supervision can take the form of on-site monitoring and off-site monitoring, adjusted to the debtor payment status. In dealing with Covid-19 condition, bank provide a credit restructurisation to debtor. In providing credit restructurisation, the bank did a preventive supervision with interviewing the debtor and observing the situation of the debtor's business. Beside bank also did repressive supervision by confirming the progress of the debtor's business, so the credit restructurisation can be adjusted to the business situation of the debtor. Supervision is carried out to prevent irregularities during lending.

Key words: *credit provision, credit supervision, Kredit Usaha Rakyat, non-performing loan (NPL).*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian “Peranan Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat dalam Usaha Mengurangi Kredit Bermasalah (Studi Kasus pada Bank BJB Cabang TS)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S-1 Manajemen, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan bagi banyak pihak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak-pihak yang terlibat untuk membantu, membimbing, dan memberikan dukungan agar skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat melewati seluruh proses dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Kedua orang tua dan kakak tercinta yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materil, kasih sayang dan semangat kepada penulis dalam setiap kondisi yang penulis hadapi. Semoga mama, bapak, dan kakak selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Ibu Inge Barlian, Dra, Ak., MSc. selaku pembimbing penulis yang dengan sabar membimbing dan selalu memberikan masukan selama proses pengerjaan skripsi berlangsung.
4. Manajer dan Staff Bisnis UMKM pada Bank BJB Kantor Cabang TS yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan kepada penulis.
5. Ibu Elaine Vashti Bestari Kustedja, S.E., M.A. dan Ibu Annisa Novieningtyas, S.E., M.S.M. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Dr. Istiharini, CMA. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Ramzy Sayuda Patria Hani Putra yang selalu memberikan keceriaan, semangat, dukungan dan waktu untuk mendengarkan cerita, keraguan dan keluh kesah penulis selama penulisan skripsi berlangsung.
9. Sahabat-sahabat penulis. Azka Faradisa, Senaya Sahara, Tessya Marsha, Priscillia Angeliana, Syilla Eltania, Hasya Rayhana, dan Ratu Salma yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan bersedia untuk meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Seluruh teman-teman Manajemen angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan, semangat, dan ilmu pengetahuan serta pengalaman berkesan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis berharap agar pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan dibalaskan kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih banyak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka pemikiran.....	5
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2. 1. Lembaga Keuangan	9
2. 2. Bank	9
2.2.1. Pengertian Bank	9
2.2.2. Fungsi Bank	10
2. 3. Kredit	11
2.3.1. Pengertian Kredit	11
2.3.2. Tujuan dan Fungsi Kredit	11
2.3.3. Unsur-Unsur Kredit	12
2.3.4. Jenis Kredit	13
2.3.5. Prinsip Evaluasi Kredit	14
2.3.6. Prosedur Pemberian Kredit.....	16

2.4. Pengawasan Kredit.....	17
2.5. Tujuan Pengawasan Kredit	18
2.6. Kredit Bermasalah	18
2.7. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah.....	18
2.8. Kredit Usaha Rakyat.....	19
2.9. Pengertian Non Performing Loan	19
BAB III	21
METODE DAN OBJEK PENELITIAN	21
3.1. Metode Penelitian	21
3.1.1 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	22
3.1.2. Alur Penelitian	22
3.4. Objek Penelitian.....	23
3.4.1 Profil Perusahaan	23
3.4.2. Visi:.....	23
3.4.3. Misi:	24
3.4.4. Logo Perusahaan.....	24
3.4.5. Bagan Struktur organisasi	25
3.4.6. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat.....	27
3.4.7. Produk Simpanan dan Pinjaman Bank BJB Cabang TS.....	28
BAB IV	30
HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Evaluasi Prosedur Pemberian dan Pengawasan Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank BJB Cabang TS.....	30
4.1.1. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat.....	30
4.1.2. Evaluasi Pengawasan Kredit Usaha Rakyat	35
4.2. Analisis Pelaksanaan Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BJB Cabang TS	37
4.2.1. Debitur RN.....	37
4.2.2. Debitur SS.....	43

4.2.3. Debitur RM	49
4.2.4. Debitur KO.....	53
4.2.5. Debitur AP	58
4.3. Faktor yang Perlu Diperhatikan Agar tidak Menimbulkan Kredit Bermasalah Pada Bank BJB Cabang TS.....	62
4.3.1. Debitur RN.....	62
4.3.2. Debitur SS.....	63
4.3.3. Debitur RM	64
4.3.4. Debitur KO.....	65
4.3.5. Debitur AP	65
BAB V	67
KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1. Kesimpulan	67
5.1.1. Evaluasi Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BJB Cabang TS	67
5.1.2. Analisis Pelaksanaan Prosedur Pemberian dan Pengawasan Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank BJB Cabang TS	68
5.1.3. Faktor yang Perlu Diperhatikan Agar Tidak Menimbulkan Kredit Bermasalah Pada Bank BJB Cabang TS.....	70
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Bagan Kerangka Pemikiran	8
Gambar 3. 1. Logo Bank BJB.....	24
Gambar 3. 2. Bagan Struktur Organisasi Bank BJB cabang TS.....	25
Gambar 4. 1. Alur Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank BJB Cabang TS.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Kolektabilitas Bank BJB.....	3
Tabel 4. 1. Gambaran Laba/Rugi Debitur RN.....	39
Tabel 4. 2. Gambaran Laba/Rugi Debitur SS	45
Tabel 4. 3. Gambaran Laba/Rugi Debitur RM	51
Tabel 4. 4. Gambaran Laba/Rugi Debitur KO.....	55
Tabel 4. 5. Gambaran Laba/Rugi Debitur AP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan dalam suatu negara menjadi sangat penting karena melakukan kegiatan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama untuk pembiayaan investasi dan pembangunan. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank terus berkontribusi untuk mengembangkan potensi perekonomian negara agar roda perekonomian di Indonesia terus berkembang. Lembaga keuangan bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan yang memiliki kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau dikenal sebagai *banknote* sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana untuk pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan.

Menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha bank terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan utama bank, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito sedangkan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank memberikan pinjaman berupa kredit. Salah satu pinjaman yang diberikan bank untuk mengembangkan potensi perekonomian negara adalah pinjaman berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki angunan tambahan atau angunan tambahan belum cukup. KUR sendiri merupakan program pemerintah yang sudah diadakan sejak tahun 2007 hingga sampai sekarang ini. Setiap tahunnya pemerintah selalu berusaha untuk menekan bunga pinjaman kredit usaha rakyat. Dimulai dari tahun 2007-2014 dengan menggunakan

skema imbal jasa (IJP) 3.25%, penetapan skema subsidi bunga sebesar 12% pada tahun 2015, 9% pada tahun 2017, hingga akhirnya pada tahun 2018 sampai sekarang pada tahun 2019 bisa mencapai bunga 7% pertahun. Dengan diadakannya kredit usaha rakyat ini pemerintah berharap dapat memperdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja baru, menanggulangi kemiskinan, dan turut serta dalam meningkatkan perekonomian Negara.¹

Bank BJB merupakan salah satu bank yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa Kredit Usaha Rakyat. Bank BJB merupakan bank BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Disamping untuk memperluas pelayanan bank kepada UMKM produktif dan mendukung program pemerintah untuk memperdayakan UMKM, bank juga ingin meningkatkan kinerja dan mendapatkan keuntungan dari pemberian KUR berupa bunga yang dibebankan kepada debitur dan biaya administrasi kredit. Namun sering kali terdapat nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga pinjaman sehingga menimbulkan NPL pada bank sebagai pihak kreditur. NPL sendiri merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesehatan aset suatu bank, perhitungan rasio NPL merupakan hasil dari total kredit yang tidak atau belum dibayarkan dibagi dengan total keseluruhan kredit yang dimiliki oleh bank. Menurut Kasmir (2013:155) *Non performing Loan* (NPL) adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa faktor timbulnya kredit bermasalah bisa disebabkan oleh pihak bank ataupun dari pihak nasabah. Semakin banyak jumlah nasabah yang tidak melakukan pembayaran, semakin tinggi nilai NPL yang akan dihasilkan pada suatu bank. Tingginya nilai NPL pada bank, mengindikasikan buruknya kinerja kredit pada suatu bank. Berikut ini merupakan tabel kolektabilitas kredit pada Bank BJB Cabang TS.

¹ <https://kur.ekon.go.id/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 13.40

Tabel 1. 1. Kolektabilitas Bank BJB

Cabang	Kolektabilitas						
	1	2A	2B	2C	3	4	5
SJ	2,821,805,558	0	0	0	0	0	15,388,882
SS	1,691,718,061	0	0	0	0	0	0
TS	3,453,566,340	0	0	0	113,499,999	0	0
UTM	8,847,110,514	0	0	0	0	0	0
BB	11,505,013,866	0	0	0	0	0	42,500,000

Sumber Data : Bank BJB

Berdasarkan tabel di atas, pada cabang TS terdapat nasabah yang masuk kedalam golongan kolektabilitas 3 sedangkan pada cabang SS dan UTM semua nasabah masuk ke dalam golongan kolektabilitas 1. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa cabang TS bisa mencegah adanya nasabah yang masuk kedalam golongan 3 agar kinerja bank secara keseluruhan bisa lebih baik lagi. Adapun cabang SJ dan cabang BB yang memiliki nasabah di golongan kolektabilitas 5, namun apabila dibandingkan jumlah pinjaman kredit bermasalah pada cabang TS jauh lebih besar. Kolektabilitas kredit pada Bank BJB sendiri digolongkan kedalam 7 golongan, penggolongan kredit ditentukan berdasarkan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Golongan 1 status lancar, debitur dalam golongan ini berarti selalu membayar angsuran pokok dan bunga kredit dengan tepat waktu
2. Golongan 2A status dalam perhatian khusus, dalam golongan ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran dan bunga kredit selama 1-30 hari
3. Golongan 2B status dalam perhatian khusus, dalam golongan ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit selama 31-60 hari
4. Golongan 2C status dalam perhatian khusus, dalam golongan ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran dan bunga kredit selama 61-90 hari
5. Golongan 3 status kredit kurang lancar, dalam golongan ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit selama 91-120 hari

6. Golongan 4 status diragukan, dalam golongan ini debitur berarti menunggak pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit selama 121-180 hari
7. Golongan 5 status macet, dalam golongan ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit selama lebih dari 180 hari.

Nasabah yang masuk ke dalam golongan kolektabilitas 3 sampai dengan 5 akan menimbulkan NPL pada bank. Untuk mencegah timbulnya nilai NPL, pihak bank perlu menjalankan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan tetap melakukan pengawasan kepada debitur setelah kredit tersebut diberikan. Pelaksanaan prosedur perlu dilakukan untuk mengetahui kelayakan debitur sedangkan pengawasan diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya. Menurut Azhar (2000: 196) prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:133) pengawasan merupakan suatu upaya meminimalisir kredit-kredit yang kurang lancar, diragukan atau macet. Kedua hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah yang akan berdampak terhadap kinerja kredit bank secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peranan Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat dalam Usaha Mengurangi Kredit Bermasalah (Studi Kasus pada Bank BJB Cabang TS)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin dibuktikan penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana evaluasi prosedur pemberian dan pengawasan kredit usaha rakyat pada Bank BJB Cabang TS?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan prosedur pemberian dan pengawasan kredit usaha rakyat pada Bank BJB Cabang TS berdasarkan kasus debitur RN, SS, RM, KO, dan AP?
3. Faktor apa yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kredit bermasalah berdasarkan kasus debitur RN, SS, RM, KO, dan AP?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana evaluasi prosedur pemberian dan pengawasan kredit usaha rakyat pada Bank BJB Cabang TS.
2. Mengetahui bagaimana analisis pelaksanaan prosedur pemberian dan pengawasan kredit usaha rakyat pada Bank BJB Cabang TS berdasarkan kasus debitur RN, SS, RM, KO, dan AP.
3. Mengetahui faktor apa yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kredit bermasalah berdasarkan kasus debitur RN, SS, RM, KO, dan AP.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh bagi penulis, perusahaan, dan pembaca dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori manajemen keuangan yang sudah didapatkan selama perkuliahan
2. Manfaat bagi perusahaan adalah sebagai sumbang pikiran yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kredit usaha rakyat
3. Manfaat bagi pembaca adalah untuk memberikan informasi mengenai sistem pengelolaan kredit usaha rakyat dan sebagai referensi penelitian selanjutnya

1.5. Kerangka pemikiran

Menurut Kasmir (2015:3) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Salah satu jenis kredit yang disalurkan oleh pihak bank adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit usaha rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable*. KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri.

Salah satu indikasi yang terkadang menjadi masalah dalam perbankan adalah bahwa tugas bank tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja, melainkan mengusahakan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Suatu bank dapat dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit keduanya berjalan dengan baik. Apabila kredit tidak dapat dikembalikan, hal tersebut akan menimbulkan kredit bermasalah dan menimbulkan penurunan kinerja kredit suatu bank. Menurut Latumaerissa (2014:162) kredit bermasalah adalah kredit yang pembayaran kembali utang pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Kinerja kredit tersebut dapat diukur dengan menggunakan rasio NPL. Rasio NPL merupakan perbandingan kredit bermasalah dengan total seluruh kredit yang disalurkan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, kredit bermasalah dapat dihitung dengan rumus rasio NPL sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\textit{kredit bermasalah}}{\textit{total kredit}} \times 100\%$$

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, pihak bank harus memperhatikan prosedur pemberian dan pengawasan kredit kepada debitur. Prosedur pemberian kredit memiliki peranan penting untuk meminimalisir kesalahan yang sering terjadi. Biasanya berupa persyaratan nasabah yang tidak sesuai dengan kondisi nasabah

yang sesungguhnya. Menurut Azhar (2000: 196) prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Selain itu, pengawasan kredit diperlukan sebagai peringatan dini untuk mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat yang telah disepakati antara kreditur dan debitur yang akan menimbulkan turunnya kolektabilitas kredit yang bersangkutan. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:133) pengawasan merupakan suatu upaya meminimalisir kredit-kredit yang kurang lancar, diragukan atau macet. Hal tersebut perlu dilakukan agar kinerja bank terus meningkat karena salah satu tujuan bank menyalurkan kredit adalah untuk meningkatkan kinerja bank. Kinerja kredit suatu bank dapat dilihat melalui nilai NPL yang dimiliki oleh bank tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu Silvia, Dzulkirom AR, dan Devi (2017) yang berjudul “Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Non Performing Loan (Studi Pada Kredit Ritel Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang)” terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dan membahas mengenai analisis prosedur pemberian kredit ritel komersil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang, analisis pelaksanaan pengawasan kredit ritel komersial pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang, dan analisis NPL pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang. Didapatkan kesimpulan bahwa pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang dilakukan dengan cara pengawasan *on-site* (dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan) dan *off-site* (dilakukan di kantor dengan pengecekan berkas). Selain itu PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang mengatasi kredit bermasalah dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, pengambil alihan asset debitur, penjualan asset debitur, melakukan penagihan via telepon, datang ke tempat usaha debitur, dan melalui surat penagihan. Selain itu juga pihak bank perlu mengimplementasikan kebijakan pemberian kredit sesuai dengan yang telah dibuat sehingga tingkat NPL bisa lebih jauh menurun.

Pada penelitian ini, penulis melakukan studi kasus terhadap 5 debitur kredit usaha rakyat yakni debitur RN, SS, RM, KO, dan AP dengan membandingkan pelaksanaan yang sudah dilakukan dengan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang sudah ada serta menganalisa faktor yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kredit bermasalah. Berikut gambaran kerangka pemikiran pada penelitian ini:

Gambar 1. 1. Bagan Kerangka Pemikiran

